

ABSTRAK SKRIPSI

Selama ini posisi keuangan dan keberhasilan kinerja suatu badan usaha selalu dilihat dari laporan keuangan yang disajikan. Perkembangan badan usaha pun biasanya dilihat dari laporan keuangan tersebut. Sebenarnya laporan keuangan, yang merupakan produk dari akuntansi keuangan, disusun dan disajikan untuk kepentingan pihak eksternal, sehingga informasi yang disajikan bersifat umum dan garis besarnya saja. Di samping pihak eksternal, pihak manajemen pun sebenarnya juga membutuhkan informasi tentang badan usaha. Hal ini dikarenakan pihak internal berkepentingan terhadap kelancaran pengelolaan kegiatan operasi badan usaha. Informasi yang dibutuhkan pihak manajemen bersifat lebih rinci dan spesifik, karena akan digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan manajerial yang berdampak masa depan. Karena itu selain laporan keuangan, perlu pula disusun laporan manajemen yang ditujukan pada pihak internal untuk memenuhi berbagai kepentingan manajerial yang tidak dapat dipenuhi oleh laporan keuangan saja. Maka jelaslah selain akuntansi keuangan, badan usaha juga memerlukan akuntansi manajemen.

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian dan makin ketatnya persaingan yang ada, badan usaha dituntut untuk melakukan pengendalian kegiatan operasi yang semakin baik. Hal ini dimaksudkan agar output yang dihasilkan badan usaha tersebut benar-benar sesuai dengan keinginan dan dapat diterima masyarakat. Apabila badan usaha makin berkembang, pimpinan pusat tentu saja tidak dapat mengatasi semua permasalahan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan pendelegasian wewenang pada unit-unit dalam organisasi. Wewenang didelegasikan dari manajer atas ke manajer di bawahnya dan pendelegasian wewenang ini menuntut manajer bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada manajer atasannya. Oleh karena itu timbul kebutuhan organisasi akan informasi akuntansi untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang. Informasi yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang disebut dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban.

Analisa penerapan dilakukan pada Hotel "X" yang berlokasi di Denpasar. Selama ini hotel hanya menyusun laporan keuangan dan

melakukan penilaian kinerja tiap departemen/unit organisasinya berdasarkan laporan keuangan tersebut. Secara periodik, tiap departemen melaporkan hasil kerjanya dengan membuat laporan rugi laba departemen. Laporan ini belum dapat dikatakan performance report karena tidak ada perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan anggarannya. Selain itu laporan tidak menunjukkan adanya pemisahan antara biaya terkendali dan tak terkendali, sehingga laporan ini tidak dapat digunakan untuk menilai efisiensi anggaran dan tidak dapat dengan cepat menelusuri siapa yang harus bertanggung-jawab dan apa penyebab penyimpangan biaya yang terjadi.

Melalui skripsi yang ditulis ini, dilakukan analisa terhadap penerapan syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban pada badan usaha dan untuk mengetahui bagaimana akuntansi manajemen dapat mendukung pengendalian, dengan cara memberikan informasi yang relevan yang dapat mempengaruhi perilaku masing-masing unit organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Terutama menyangkut sistem penganggaran, klasifikasi biaya ke dalam controlable dan uncontrolable cost, serta sistem laporan pelaksanaan sehingga dengan mudah dapat memantau dan mendeteksi sedini mungkin masalah yang dihadapi badan usaha. Adapun teknik yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah teknik penulisan eksposisi.

Hasil analisa yang didapat setelah melakukan pembahasan adalah sebagai berikut : penyusunan dan klasifikasi kode rekening sebaiknya disesuaikan dengan tiap pusat biaya sehingga akan memudahkan pengidentifikasian biaya yang ditimbulkan oleh masing-masing pusat biaya. Anggaran harus disusun pada tiap tingkatan manajemen dan para pelaksana anggaran harus diikutsertakan dalam proses penyusunannya. Harus ada pemisahan antara biaya terkendali dan tak terkendali untuk memudahkan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, karena tanggung jawab manajer tiap pusat biaya hanya terhadap biaya yang masih dalam batas wewenangnya. Laporan pertanggungjawaban biaya harus dibuat dan ditujukan pada tiap pusat biaya serta harus memuat perbandingan antara biaya yang dianggarkan dan realisasinya, sehingga bila ada penyimpangan biaya yang terjadi dapat diketahui dan ditelusuri dengan cepat, dan dapat diambil tindak lanjut yang diperlukan.